

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Administrasi perkantoran memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran kegiatan di lingkungan DPRD Provinsi Sumatera Barat, terutama dalam pengelolaan dokumen dan surat-menyurat yang membutuhkan sistem kerja yang tertib dan terorganisir.
2. Perkembangan teknologi informasi mendorong kebutuhan akan sistem administrasi yang lebih cepat, efisien, dan praktis, sehingga digitalisasi menjadi solusi untuk menggantikan sistem manual yang kurang efektif.
3. Penerapan digitalisasi administrasi di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat telah dilakukan melalui berbagai sistem berbasis web, seperti pencatatan SPT dan penggunaan aplikasi SRIKANDI, yang membantu meningkatkan kecepatan dan kemudahan dalam pengelolaan administrasi.
4. Digitalisasi administrasi memberikan dampak positif, seperti mempercepat proses pencarian dokumen, meningkatkan keamanan data, serta meningkatkan efisiensi kerja pegawai dalam menjalankan tugas.
5. Meskipun demikian, proses digitalisasi masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi, belum meratanya kemampuan pegawai dalam menggunakan sistem digital, serta belum terintegrasinya seluruh sistem secara optimal.
6. Untuk mendukung keberhasilan digitalisasi secara menyeluruh, diperlukan upaya peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan sumber daya manusia, pembentukan tim teknis, serta pengembangan dan pembaruan sistem secara berkelanjutan.
7. Digitalisasi administrasi tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup perubahan pola kerja menuju sistem yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi.

## 5.2 Saran

Agar penerapan digitalisasi administrasi di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat berjalan dengan baik dan terus berkembang, berikut beberapa saran yang bisa menjadi acuan:

### 1. Perangkat kerja perlu ditingkatkan

Komputer, printer, dan jaringan internet harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem digital. Tanpa perangkat yang memadai, proses digitalisasi akan berjalan lambat dan tidak maksimal.

### 2. Pegawai perlu diberikan pelatihan secara rutin

Materi pelatihan sebaiknya mudah dipahami dan sesuai dengan tugas masing-masing. Jika perlu, dibuat modul atau panduan praktis agar pegawai bisa belajar secara mandiri.

### 3. Sistem digital sebaiknya dibuat lebih terhubung

Jika seluruh aplikasi saling terkoneksi, pegawai tidak perlu membuka banyak sistem untuk satu pekerjaan. Hal ini juga membantu menghindari data ganda dan membuat pekerjaan lebih efisien.

### 4. Perlu dibentuk tim bantuan teknis di lingkungan kantor

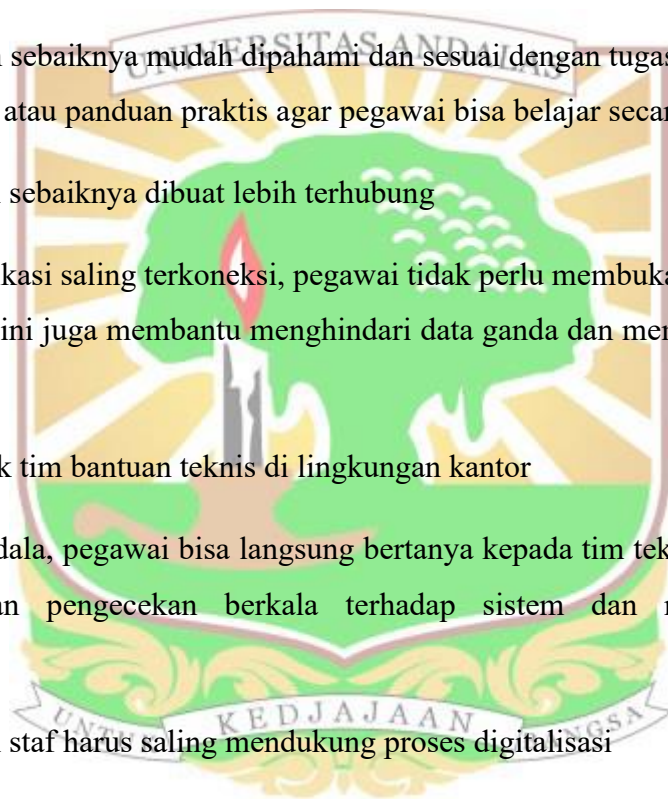
Saat terjadi kendala, pegawai bisa langsung bertanya kepada tim teknis. Tim ini juga bisa bertugas melakukan pengecekan berkala terhadap sistem dan memberikan laporan perkembangan.

### 5. Pimpinan dan staf harus saling mendukung proses digitalisasi

Pimpinan dapat menjadi contoh dalam penggunaan sistem digital, sehingga pegawai merasa terdorong untuk mengikuti. Sikap terbuka terhadap perubahan juga penting agar tidak ada hambatan dalam penerapan sistem baru.

### 6. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala

Dengan melakukan evaluasi, kantor bisa mengetahui bagian mana dari sistem yang sudah berjalan baik dan bagian mana yang masih perlu diperbaiki. Hasil evaluasi ini akan sangat membantu dalam pengembangan sistem selanjutnya.



Digitalisasi administrasi adalah proses yang terus berkembang. Dengan kerja sama, semangat belajar, dan kemauan untuk berubah, seluruh pegawai di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat akan semakin siap menghadapi tantangan kerja di masa mendatang. Tujuan akhirnya adalah terciptanya sistem kerja yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien, demi mendukung pelayanan kepada masyarakat.

